

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	5
BAB II	6
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	6
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	6
2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah ditetapkan.	8
BAB III	9
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	9
3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD	9
3.1.1. Pendapatan - LRA	9
3.1.2. Belanja	9
3.1.3. Pendapatan - LO	10
3.1.4. Beban	10
Beban Operasi	11
3.1.5. Aset	12
3.1.6. KEWAJIBAN	16
3.1.7. EKUITAS DANA	18
3.2. Pengungkapan atas Pos-pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang menggunakan Basis AkruaI pada SKPD.	19
BAB IV	21
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	21
BAB V	23
PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu

entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 8);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON
KEUANGAN SKPD

BAB V : PENUTUP

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2023 melalui APBD Tahun Anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp4.440.725.957,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp4.425.725.957,00 dan Belanja Modal sebesar Rp15.000.000,00 yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp4.362.951.072,00 atau terserap sebesar 98,25% dan dapat dirinci pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5
I	Belanja Operasi	4.425.725.957,00	4.347.951.072,00	98,24%
II	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%

Berdasarkan DPA Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung tahun 2023 total anggaran sejumlah Rp 4.440.725.957,00 terbagi menjadi 4 program, 9 kegiatan dan 21 sub kegiatan. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinpusip Kabupaten Temanggung dapat diuraikan sebagai berikut:

Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	(%)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.520.854.557,00	3.468.031.328,00	98,50
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.977.100,00	99,54
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.995.500,00	15.882.600,00	99,29
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	4.999.700,00	99,99
Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.150.000,00	8.550.450,00	76,69
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.996.500,00	36.820.311,00	99,52
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	2.015.000,00	67,17
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000,00	74.744.951,00	99,66
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.915.000,00	10.881.234,00	99,69
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	279.321.600,00	271.514.864,00	97,21
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.493.000,00	75.958.222,00	96,77
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	15.872.431,00	79,36
Pengembangan dan Pemeliharaan	10.000.000,00	9.586.000,00	95,86

Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	(%)
Layanan Perpustakaan Elektronik			
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.929.150,00	99,93
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	94.000.000,00	92.824.000,00	98,75
Pengembangan Bahan Pustaka	15.000.000,00	15.000.000,00	100
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	98.000.000,00	93.619.930,00	95,53
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	19.999.800,00	19.912.301,00	99,56
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	2.000.000,00	1.981.500,00	99,07
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	33.000.000,00	32.850.00,00	99,55
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000,00	7.000.000,00	100
Jumlah	4.440.725.957,00	4.362.951.072,00	98,25

Berikut disampaikan penyerapan dana pada masing-masing program:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota mencapai 98,24% dengan realisasi sebesar Rp.3.990.248.191,00 dari anggaran sebesar Rp.4.061.726.157,00
- b. Program Pembinaan Perpustakaan mencapai 98,09% dengan realisasi sebesar Rp.310.959.080,00 dari anggaran sebesar Rp.317.000.000,00.
- c. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno mencapai 99,54% dengan realisasi Rp.19.912.301,00 dari anggaran Rp.19.999.800,00.
- d. Program Pengelolaan Arsip mencapai 99,60% dengan realisasi Rp.41.831.500,00 dari anggaran Rp.42.000.000,00.

Secara umum seluruh kegiatan yang tercantum di DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung dapat terlaksana dengan baik meskipun realisasi keuangannya ada yang kurang dari 80%, yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Realisasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat kurang dari 80% karena pada Sub Kegiatan ini kami alokasikan pada belanja perjalanan dinas dalam kota, sedangkan kondisi sekarang untuk keperluan surat menyurat lebih banyak menggunakan aplikasi Srikandi sehingga surat dapat dikirim langsung ke alamat tujuan tanpa harus datang langsung ke alamat yang dituju. Realisasi pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu kurang dari 80% karena disesuaikan dengan kebutuhan (untuk memenuhi belanja rutin keperluan minuman harian pegawai) sampai akhir tahun 2023. Pada Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kurang dari 80% karena dengan sisa anggaran tersebut untuk membiayai pemeliharaan Gedung (perbaikan atap Gedung) tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan kondisi atap Gedung tersebut.

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah ditetapkan.

a. Hambatan dan Permasalahan dalam Pendapatan

Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala dalam upaya memperoleh pendapatan karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak menetapkan target pendapatan. Pendapatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah denda keterlambatan pengembalian atas pinjaman buku yang dimasukkan sebagai pendapatan denda retribusi yang langsung masuk ke RKUD Kabupaten Temanggung.

b. Hambatan dan Permasalahan dalam Belanja

Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala dalam upaya penyerapan anggaran melalui belanja-belanja pada masing-masing sub kegiatan. Namun demikian masih terdapat hambatan dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang kurang maksimal karena keterbatasan ketersediaan anggaran dan sarana/prasarana.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Berdasarkan APBD-P Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung mengelola denda keterlambatan pengembalian buku perpustakaan yang tidak ada dalam anggaran karena bukan merupakan pendapatan yang ditargetkan. Pada tahun anggaran 2023 atas denda keterlambatan mencapai Rp.3.300.500,00.

Pendapatan		Tahun 2023	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)
41	Pendapatan Asli Daerah	0,00	3.300.500,00
4104	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	3.300.500,00
410413	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	3.300.500,00
	Jumlah Pendapatan	0,00	3.300.500,00

3.1.2. Belanja

Realisasi Anggaran Belanja TA 2023 sebesar Rp. 4.362.951.072,00 atau 98.25% dari anggaran sebesar Rp. 4.440.725.957,00 adapun rincian belanja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	BELANJA DAERAH	4.440.725.957,00	4.362.951.072,00	98,25
51	BELANJA OPERASI	4.425.725.957,00	4.347.951.072,00	98,24
5101	Belanja Pegawai	3.520.854.557,00	3.468.031.328,00	98,50
5102	Belanja Barang dan Jasa	904.871.400,00	879.919.744,00	97,24
52	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	100
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100

3.1.3. Pendapatan - LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO merupakan retribusi jasa usaha TA 2022, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dengan Pendapatan – LO sebesar Rp3.300.500,00.

3.1.4. Beban

Beban-LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1(satu) tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar.

Beban Pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp 3.467.281.278,00.

Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 Rp 896.476.001,00 terdiri dari Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas dan beban uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
	Jumlah Pendapatan	3.300.500,00
8	BEBAN DAERAH	4.631.913.732,60
81	BEBAN OPERASI	4.631.913.732,60
8101	Beban Pegawai	3.467.281.278,00
810101	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.089.268.088,00
810102	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.378.013.190,00
8102	Beban Barang dan Jasa	896.476.001,00
810201	Beban Barang	189.019.050,00
810202	Beban Jasa	571.200.727,00
810203	Beban Pemeliharaan	27.593.078,00
810204	Beban Perjalanan Dinas	93.813.146,00
810205	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.850.000,00
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	268.156.453,60
810801	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	72.023.824,39
810802	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	196.108.879,21
810803	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	23.750,00
	Jumlah Beban	4.631.913.732,60
	Surplus Defisit LO	(4.350.301.852,60)

Beban Operasi

Jumlah Beban Operasi adalah sebesar Rp 4.631.913.732,60 yang merupakan penjumlahan beban pegawai dan beban barang/jasa.

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 merupakan hasil dari Belanja Pegawai 2023 ditambah utang pegawai per 31 Desember 2023 dikurangi utang belanja 2022.

Belanja pegawai 2023	3.468.031.328,00	
Utang belanja pegawai 31 Des 2023	99.673.389,00	+
	<hr/>	
	3.567.704.717,00	
Utang belanja pegawai 2022	100.423.439,00	-
	<hr/>	
Beban Pegawai	3.467.281.278,00	

b. Beban Barang dan Jasa

Beban barang jasa merupakan hasil dari perhitungan belanja barang jasa ditambah utang barang/jasa 2023 ditambah persediaan awal 2023 dikurangi persediaan per 31 Desember 2023 dan utang barang/jasa awal 2023.

Belanja barang/jasa	=	Rp	879.919.744	
Utang belanja barang/jasa 2023	=	Rp	36.187.603	
Persediaan awal	=	Rp	17.897.575	
Beban barang modal menjadi pemeliharaan	=	Rp	0	
Beban barang modal menjadi persediaan	=	Rp	0	+
			<hr/>	
		Rp	934.004.922	
Persediaan per 31 Des 2023	=	Rp	2.626.300	
Utang barang/jasa 2022	=	Rp	34.902.621	-
			<hr/>	
Beban Barang dan Jasa	=	Rp	896.476.001	

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi diperoleh dari:

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	=	72.023.824,39	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	=	196.108.879,21	
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	=	23.750,00	+
		<hr/>	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	=	268.156.453,60	

Surplus/Defisit dari operasi

Surplus/defisit dari kegiatan operasional yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Karena tidak ada pendapatan maka dalam hal ini defisit operasi adalah sebesar -Rp 4.350.301.852,60

3.1.5. Aset

Sesuai Laporan Neraca periode 31 Desember 2023, aset pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung dapat kami uraikan sebagai berikut:

3.1.5.1. ASET LANCAR

Posisi Aset Lancar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Kode Rekening	Nama Rekening	Awal	Akhir
11	ASET LANCAR	17.897.575,00	2.654.500,00
1101	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
110102	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
110103	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1112	Persediaan	17.897.575,00	2.626.300,00
111201	Barang Pakai Habis	17.897.575,00	2.626.300,00

1. Kas dan setara Kas

Saldo Kas dan setara kas sebesar Rp. 0,00 terdiri dari uang di rekening giro Bendahara pengeluaran sebesar Rp.0,00 dana yang masih berada di Bendahara sebesar Rp,0,00 Kas di Kas Umum Daerah

a. Saldo Kas di Kas Umum Daerah dalam bentuk rekening giro Bendahara Pengeluaran sebesar dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa Kas (UYHD) yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00.

Kas dan setara kas	2023	2022
Kas di Kas Umum Daerah	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0.00
Kas Lainnya	0,00	0.00

Jumlah Kas dan setara kas	0,00	0.00
---------------------------	------	------

2. Persediaan

Menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih di berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung dengan rincian saldo per tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp 2.626.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Nama Rekening	Nilai (Rp)
111201030001	Alat Tulis Kantor	20.000,00
111201030002	Kertas dan Cover	1.445.000,00
111201030003	Bahan Cetak	180.000,00
111201030007	Perabot Kantor	360.000,00
111201030008	Alat Listrik	132.000,00
111201030013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	489.300,00
JUMLAH		2.626.300,00

3.1.5.2. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2023 yang terinci sebagai berikut :

Kode Rekening	Nama Rekening	Awal	Akhir
1	ASET	11.412.844.837,61	11.422.728.489,01
13	ASET TETAP	11.390.047.262,61	11.415.202.189,01
1301	Tanah	1.804.196.501,00	1.804.196.501,00
130101	Tanah	1.804.196.501,00	1.804.196.501,00
1302	Peralatan dan Mesin	3.057.617.654,00	3.223.695.054,00
130201	Alat Besar	11.120.000,00	11.120.000,00
130202	Alat Angkutan	740.707.102,00	668.624.502,00
130203	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.954.750,00	2.954.750,00
130205	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.730.390.013,00	1.842.614.013,00
130206	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	88.237.050,00	88.237.050,00
130208	Alat Laboratorium	11.446.500,00	77.642.500,00
130210	Komputer	449.383.939,00	509.123.939,00
130215	Alat Keselamatan Kerja	23.378.300,00	23.378.300,00
1303	Gedung dan Bangunan	10.095.812.697,00	10.095.812.697,00
130301	Bangunan Gedung	10.095.812.697,00	10.095.812.697,00

1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	950.000,00	950.000,00
130404	Jaringan	950.000,00	950.000,00
1305	Aset Tetap Lainnya	1.954.322.375,00	2.027.664.455,00
130501	Bahan Perpustakaan	1.948.622.375,00	2.021.964.455,00
130502	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5.700.000,00	5.700.000,00
1307	Akumulasi Penyusutan	(5.522.851.964,39)	(5.737.116.517,99)
130701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.009.792.176,66)	(3.027.924.101,05)
130702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.507.098.537,73)	(2.703.207.416,94)
130703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(261.250,00)	(285.000,00)
130704	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(5.700.000,00)	(5.700.000,00)

Ikhtisar mutasi selama Tahun 2023

Aset Tetap	Saldo Awal 2023	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
Tanah	1.804.196.501,00	0	0	1.804.196.501,00
Peralatan & Mesin	3.057.617.654,00	238.160.000	72.082.600	3.223.695.054,00
Gedung & Bangunan	10.095.812.697,00	0	0	10.095.812.697,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	950.000,00	0	0	950.000,00
Aset Tetap Lainnya	1.954.322.375,00	73.342.080,00	0	2.027.664.455,00
Akumulasi Penyusutan	5.522.851.964,39	268.156.453,60	53.891.900,00	5.737.116.517,99

Saldo akhir aset tetap tahun 2023 sebesar Rp 11.415.202.189,01 yang disajikan di dalam neraca merupakan nilai dari neraca awal 2023 yaitu Rp 11.390.047.262,61 ditambah belanja modal dan mutasi masuk serta dikurangi mutasi keluar yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Aset Tetap – Tanah

Saldo per 31 Des 22	Rp. 1.804.196.501,00
Mutasi	Rp -
Saldo per 31 Des 23	Rp. 1.804.196.501,00

2) Aset Tetap – peralatan dan mesin

Saldo per 31 Des 22	Rp. 3.057.617.654,00
---------------------	----------------------

Penambahan :

Hibah dari Perpustakaan Nasional RI

4 unit <i>Personal Computer</i>	Rp.	63.232.000,00
1 unit <i>Digital Library Station</i>	Rp.	14.820.000,00
1 unit Televisi LED 43 inch	Rp.	7.904.000,00
1 unit <i>Power Back Up</i> (UPS)	Rp.	2.964.000,00
1 set rak kayu	Rp.	26.000.000,00
3 unit sofa	Rp.	18.000.000,00
1 unit Jaringan Komunikasi	Rp.	39.980.000,00
5 unit Tablet android	Rp.	19.760.000,00
Hibah dari Forum Ikatan Kadang Temanggung (FIKT)		
5 Rak Buku	Rp.	35.000.000,00
1 set meja kursi	Rp.	7.500.000,00
1 set hiasan dinding	Rp.	3.000.000,00
Pengurangan :		
Mutasi ke pengelola		
Sedan Timor/S515-I	Rp.	60.000.000,00
Sepeda Motor Suzuki	Rp.	12.082.600,00
Saldo per 31 Des 23	Rp.	3.223.695.054,00

3) Aset Tetap – Gedung dan bangunan

Saldo per 31 Des 22	Rp.	10.095.812.697,00
Mutasi	Rp.	-
Saldo per 31 Des 23	Rp.	10.095.812.697,00

4) Aset Tetap - Jalan,Irigasi dan Jaringan

Saldo per 31 Des 22	Rp.	950.000,00
Mutasi	Rp.	-
Saldo per 31 Des 23	Rp.	950.000,00

5) Aset Tetap Lainnya

Saldo per 31 Des 22	Rp.	1.954.322.375,00
---------------------	-----	------------------

Penambahan:

Belanja Modal 322 judul buku	Rp.	15.000.000,00
Hibah dari Perpustakaan Nasional RI		
350 judul buku	Rp.	43.667.780,00
Hibah dari Forum Ikatan Kadang Temanggung (FIKT)		
71 judul buku	Rp.	14.674.300,00

Saldo per 31 Des 23 Rp. 2.027.664.455,00

6) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo per 31 Des 22 Rp. 5.522.851.964,39

Penambahan:

Penyusutan tahun berjalan Rp. 268.156.453,60

Hibah dari Perpunas RI Rp. 18.190.700,00

Pengurangan :

Mutasi ke Pengelola Rp. 72.082.600,00

Saldo per 31 Des 23 Rp. 5.737.116.517,99

3.1.5.3. Aset Lainnya

Komposisi dan nilai saldo Aset Lainnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2023 yang terinci sebagai berikut:

Kode Rek.	Nama Rekening	Awal	Akhir
15	ASET LAINNYA	4.900.000,00	4.900.000,00
1503	Aset Tidak Berwujud	21.424.760,00	21.424.760,00
150301	Aset Tidak Berwujud	21.424.760,00	21.424.760,00
1504	Aset Lain-lain	153.203.030,00	153.203.030,00
150401	Aset Lain-lain	153.203.030,00	153.203.030,00
1505	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(21.424.760,00)	(21.424.760,00)
150501	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(21.424.760,00)	(21.424.760,00)
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(148.303.030,00)	(148.303.030,00)
150601	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(148.303.030,00)	(148.303.030,00)

Saldo akhir aset lainnya tahun 2023 sebesar Rp 4.900.000,00 disajikan di dalam neraca merupakan nilai dari neraca awal 2023 yaitu Rp 4.900.000,00 yang dikurangi penghapusan aset tidak berwujud Rp 9.438.400 dan akumulasi penyusutannya Rp 9.438.400.

3.1.6. KEWAJIBAN

Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Hutang PFK (Hutang Pada Pihak Ketiga), Hutang Bunga dll.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

Nilai kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp135.860.992,00 merupakan utang Belanja Pegawai dan Utang Belanja Barang dan Jasa, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Tidak ada hutang Pada Pihak Ketiga (Hutang PFK) per 31 Desember 2023 karena pajak sudah disetor tidak melewati tanggal 31 Desember 2023.

b. Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp135.860.992,00 terdiri dari:

- Utang Belanja Pegawai yang merupakan utang Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp 99.673.389,00
- Utang Belanja Barang dan Jasa yang terdiri dari Utang Belanja Jasa Kantor dan Utang Belanja Honor Tenaga Administrasi, Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan Bulan Desember 2023, sebesar Rp 36.187.603,00.

Nilai kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Nama Rekening	2022	2023
2	KEWAJIBAN	135.326.060,00	135.860.992,00
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	135.326.060,00	135.860.992,00
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0

210105	Utang PPh Pusat	0	0
210106	Utang PPN Pusat	0	0
210109	Utang Pajak Daerah Katering	0	0
2106	Utang Belanja	135.326.060,00	135.860.992,00
210601	Utang Belanja Pegawai	100.423.439,00	99.673.389,00
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	34.902.621,00	36.187.603,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	135.326.060,00	135.860.992,00

Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah (Rp)
210601	Utang Belanja Pegawai	99.673.389,00
210601020001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	98.888.889,00
210601020005	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	784.500,00
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	36.187.603,00
210602020026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	9.777.000,00
210602020030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	7.000.000,00
210602020031	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	10.800.000,00
210602020033	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	1.750.000,00
210602020059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	96.703,00
210602020060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	412.000,00
210602020061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	6.351.900,00

3.1.7. EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah kewajiban/hutang pemerintah daerah. Struktur dan Isi Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: Ekuitas awal, Ekuitas akhir, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas,

yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Rekening	Nama Rekening	2022	2023
3	EKUITAS	11.277.518.777,61	11.286.867.497,01
31	EKUITAS	11.277.518.777,61	11.286.867.497,01
3101	Ekuitas	11.277.518.777,61	11.277.518.777,61
310101	Ekuitas	11.277.518.777,61	11.277.518.777,61
3103	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	0	4.359.650.572,00
310301	RK PPKD	0	4.359.650.572,00
	JUMLAH EKUITAS	11.277.518.777,61	11.286.867.497,01

Ekuitas untuk dikonsolidasikan adalah rekening RK-PPKD, mutasinya didapat dari seluruh transaksi STS dan SP2D serta Jurnal Memorial yang diperlukan selama 2023 sebesar Rp4.359.650.572,00, sedangkan Ekuitas akhir pada tahun 2023 adalah Rp 11.286.867.497,01.

Setor Kas Daerah

Penyetoran sisa UYHD sebesar Rp9.815.533,00 terdiri dari pengembalian Ganti Uang Persediaan sebesar Rp3.906.557,00 dan Pengembalian Tambah Uang Persediaan sebesar Rp5.908.976,00.

- 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang menggunakan Basis AkruaI pada SKPD.

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah pada LRA	Jumlah pada LO	Selisih
510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.369.819.940,00	1.368.285.390,00	1.534.550,00

510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	8.943.300,00	9.727.800,00	(784.500,00)
510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	113.435.300,00	113.435.500,00	(200,00)
510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	83.995.512,00	84.000.000,00	(4.488,00)
510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	129.593.268,00	129.600.000,00	(6.732,00)
510202010033	Belanja Jasa Tenaga Supir	20.998.878,00	21.000.000,00	(1.122,00)
510202010059	Belanja Tagihan Telepon	746.951,00	783.466,00	(36.515,00)
510202010060	Belanja Tagihan Air	4.798.000,00	4.858.700,00	(60.700,00)
510202010061	Belanja Tagihan Listrik	69.200.000,00	70.375.225,00	(1.175.225,00)

Pada pos Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS, Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Sopir, Tagihan Telepon, Tagihan Air, Tagihan Listrik, terdapat selisih antara LRA dan LO. Total selisih adalah sebesar Rp 534.932,00. Selisih tersebut karena adanya perbedaan jumlah utang awal tahun 2023 yaitu sebesar Rp135.326.060,00 dan utang akhir tahun 2023 sebesar Rp135.860.992,00.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1 Data Umum Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 29 tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan SOTK Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah. Entitas pelaporan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung beralamat di Jalan Suwandi Suwardi No. 1 Temanggung.

4.2 Struktur Organisasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
5. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan

6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian
- c. Kepala Bidang Perpustakaan
- d. Kepala Bidang Kearsipan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

4.1 MUTASI PEGAWAI

Selama tahun 2023 terjadi pergantian/mutasi pejabat dan staf pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan antara lain pergantian Kepala Dinas, pengisian Sekretaris Dinas, pengisian Kepala Bidang Perpustakaan karena pejabat lama telah purna tugas.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagai wujud transparansi dari pertanggungjawaban kepada masyarakat dan negara. Laporan ini merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang segera akan disusun.

Catatan Atas Laporan Keuangan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Laporan Keuangan, keberadaan CaLK ini membantu *stakeholders* untuk memahami laporan keuangan pemerintah daerah. Kewajiban menyajikan laporan keuangan yang mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting mengingat beragamnya latar belakang pendidikan para pengguna laporan yang kebanyakan tidak terlalu akrab dengan struktur laporan keuangan. Laporan Keuangan yang sulit dipahami berpotensi menimbulkan berbagai macam salah penafsiran di antara para pembacanya.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung TA 2023 yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, dan dipergunakan sebagai dasar penyusunan/ perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan dapat dikonsolidasi dengan laporan keuangan OPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 22 Februari 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang



SALDIYONO ATMAJI, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19790325 199802 1 001